

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *State Of The Art* (Penelitian Terdahulu)

*State of The Art* atau Penelitian terdahulu merupakan bahan komparasi dan referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memetakan bagaimana posisi penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya dengan mencari dan menelusuri hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan atau relevan dengan sasaran penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan tentang pengendalian pembangunan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husin, dkk pada tahun 2019 dengan judul kajian “Membangun Sistem Kendali Dana Desa Berbasis Komunitas Masyarakat”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen komunikasi dan aktivitas pengendalian sangat berpengaruh terhadap pengamanan dana desa di lapangan dan indikator seperti *outcome*, *benefit* dan *impact* sudah lebih dirasakan oleh masyarakat. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama tentang pengendalian namun dengan fokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini berfokus pada pengendalian dana desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan (Husin, 2019).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, dkk pada tahun 2019 dengan judul kajian “Tingkat Partisipasi *Stakeholders* Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat kuat dan sangat kuat namun dalam hal kesediaan masyarakat dalam memberikan materi dalam mendukung pembangunan masih tergolong cukup dan untuk

partisipasi dari pemerintah sendiri tergolong kuat dan sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dalam regulasi, keterlibatan pemerintah dalam penyusunan program, pendampingan pelaksanaan pembangunan, evaluasi dari audit pemanfaatan DD dan ADD serta pemanfaatan hasil pembangunan yang sesuai dengan harapan namun dalam hal ketersediaan kerjasama dengan investor masih tergolong cukup serta untuk tingkat partisipasi dari *private sector* masih kurang karena pemanfaatannya belum dapat menyentuh pembangunan secara keseluruhan. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan sama-sama tentang partisipasi namun dalam fokus yang berbeda. Pada penelitian ini partisipasi sebagai fokus penelitiannya sedangkan yang akan dilakukan partisipasi sebagai dimensi dari pengendalian pembangunan (Junaidi *et al.*, 2019).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Astika dan Subawa pada tahun 2021 dengan judul kajian "Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Desa Penatahan telah melaksanakan tahapan pembangunan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Pembangunan yang telah dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan serta adanya ketergantungan anggaran pembangunan dikarenakan tidak adanya pendapatan asli desa. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat perbedaan dalam metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama tentang pembangunan yang mana sama-sama terdapat masalah penurunan status desa pada indeks desa membangun (Astika, 2021).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Subekan pada tahun 2020 dengan judul kajian "Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus

Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor pendorong yang berpotensi besar terhadap pembangunan desa yaitu masyarakat yang produktif, potensi sumber daya alam yang mendukung perekonomian desa, mempunyai pimpinan dan perangkat desa yang visioner serta amanah, adanya kemampuan dan kapabilitas dari perangkat desa yang memadai serta adanya partisipasi yang tinggi. Faktor pendorong tersebut dikelola dengan baik dengan adanya pengelolaan keuangan desa dan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbukaan aspirasi dan partisipasi masyarakat, lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat daripada kepentingan perangkat desa, adanya pengadaan barang/jasa di desa dan berprioritas pada kegiatan yang berpengaruh besar bagi pertumbuhan perekonomian desa sehingga menghasilkan pembangunan yang terbaik. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat perbedaan dalam metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama berkaitan dengan indeks desa membangun namun dengan fokus yang berbeda. Pada penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Desa Ngroto Kecamatan Pujon yang dilihat dari pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meraih indeks desa membangun tertinggi nasional pada tahun 2018 sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penurunan status pada indeks desa membangun yang akan dianalisis dari sisi pengendalian pembangunan desa (Subekan, 2020).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hajratul, dkk pada tahun 2020 dengan judul kajian “Analisis Indeks Desa Membangun Desa Jeruju Besar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif . Adapun hasil dari penelitian ini adalah penurunan status desa Jeruju Besar dari mandiri

menjadi maju dikarenakan kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang tersedia dan masih terbatasnya pelayanan dasar dan SDM serta adanya kondisi hutan mangrove yang mulai rusak namun masih terdapat beberapa potensi diantaranya adanya solidaritas dari masyarakat, adanya lokasi wisata, lembaga keuangan sebagai akses permodalan dan adanya BUMDes sebagai lembaga ekonomi. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menunjukkan adanya penurunan status desa sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan juga fokus penelitiannya yang mana pada penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis IDM sehingga diketahui masalah dari adanya penurunan status desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada adanya masalah penurunan status akan diteliti dari sisi pengendalian pembangunan (Hajratul *et al.*, 2020).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Lahada pada tahun 2018 dengan judul kajian “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kepemimpinan memegang peranan yang penting sebagai motor penggerak dalam memotivasi dan memberikan semangat serta dorongan untuk membangkitkan, mengarahkan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kemasyarakatan agar terlaksana dengan baik. Dalam penelitian ini terdapat kasus dimana kepala desa Malei Lage kurang optimal dalam melaksanakan pekerjaannya seperti penegakan dalam disiplin waktu, pengambilan keputusan yang tidak melibatkan staf atau aparatur desa, kurangnya motivasi dan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan serta masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan yang ada ditingkat desa bersama lembaga kemasyarakatan. Adapun hasil penelitian ini adalah peranan kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik belum baik dan faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan kepala



desa dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso adalah SDM dan fasilitas sarana dan prasarana. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama terdapat kepemimpinan namun dalam fokus yang berbeda. Pada penelitian ini kepemimpinan sebagai fokus utama sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan kepemimpinan sebagai dimensi dalam pengendalian pembangunan serta metode yang digunakan juga berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif (Lahada, 2018).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Gerasimov, dkk pada tahun 2019 dengan judul kajian “*Control in the Human Capital Management System in the Strategy of innovative Development of A Region*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih kurangnya pengendalian dalam sistem manajemen sumber daya manusia untuk pengembangan inovatif di Republik Tatarstan. Hal ini dapat diketahui dari program pembangunan Ibukota Republik Tatarstan pada tahun 2030 tidak terdapat target dalam pengembangan sumber daya manusia dan tidak menghubungkan antara pelaku dan akuntabilitas dalam struktur pelaksana. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama tentang pengendalian namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini berfokus pada pengendalian sistem manajemen sumber daya manusia sebagai strategi dalam pembangunan berkelanjutan yang inovatif daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan (Gerasimov *et al.*, 2019).
8. Penelitian yang dilakukan oleh Sujianto, dkk pada tahun 2020 dengan judul kajian “*Institutional Model Of Sustainable Development For Controlling Clove Pest Management*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga model kelembagaan yaitu kelompok temu urip di Sumedang, maju bersama dan

tanijaya hanya berfokus pada kegiatan kerjasama yang meliputi pembukaan lahan, proses budidaya tanaman, penyiangan, panen dan simpan pinjam. Dalam hal ini model kelembagaan yang khusus untuk pengendalian hama belum dikembangkan dan adanya asosiasi dari petani ini berperan penting sebagai lembaga yang mengendalikan hama cengkeh dalam tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan tingkat desa. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama tentang pengendalian namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini berfokus pada pengendalian hama cengkeh yang ditinjau dari model kelembagaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan yang ditinjau dari kepemimpinan, partisipasi, transparansi dan responsivitas *stakeholders* (Sujianto *et al.*, 2020).

9. Penelitian ini dilakukan oleh Syarifuddin, dkk pada tahun 2019 dengan judul kajian “*Village Development Planning Discussion in Indonesia: Is it working?*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang. Hal ini adanya musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sehingga tidak berjalan efektif. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama tentang pembangunan desa namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini berfokus pada perencanaan pembangunan desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan dan juga dengan metode yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif (Syarifuddin *et al.*, 2019).
10. Penelitian yang dilakukan oleh Nurman, dkk pada tahun 2020 dengan judul kajian “*Participatory Village Development Planning Model*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun hasil

penelitian ini adalah perencanaan pembangunan desa partisipatif masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurang sinkronnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Desa dalam perumusan dan penetapan prioritas pembangunan. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama tentang pembangunan desa namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini berfokus pada model perencanaan pembangunan desa partisipatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan yang ditinjau dari unsur kepemimpinan, partisipasi, transparansi dan responsivitas *stakeholders* dan dengan metode yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif (Nurman *et al.*, 2020).



**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Membangun Sistem Kendali Dana Desa Berbasis Komunitas Masyarakat oleh Husin,dkk pada tahun 2019	Merancang sistem pengendalian dana desa berbasis masyarakat desa	Komitmen komunikasi dan aktivitas pengendalian sangat berpengaruh terhadap pengamanan dana desa di lapangan dan indikator seperti <i>outcome</i> , <i>benefit</i> dan <i>impact</i> sudah lebih dirasakan oleh masyarakat	Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama tentang pengendalian namun dengan fokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini berfokus pada pengendalian dana desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan serta dengan metode penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif.
2	Tingkat Partisipasi <i>Stakeholders</i> Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas oleh Junaidi dkk pada tahun 2019	Menganalisis tingkat partisipasi <i>stakeholders</i> dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sambas	Tingkat partisipasi masyarakat kuat dan sangat kuat namun dalam hal kesediaan masyarakat dalam memberikan materi dalam mendukung pembangunan masih tergolong cukup dan untuk partisipasi dari pemerintah sendiri tergolong kuat dan sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dalam regulasi, keterlibatan pemerintah dalam penyusunan program, pendampingan pelaksanaan pembangunan, evaluasi dari audit pemanfaatan DD dan ADD serta pemanfaatan hasil pembangunan yang sesuai dengan harapan namun dalam hal ketersediaan kerjasama dengan investor masih tergolong cukup serta untuk tingkat partisipasi dari <i>private sector</i> masih kurang karena pemanfaatannya belum dapat menyentuh pembangunan secara keseluruhan	Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan sama-sama tentang partisipasi namun dalam fokus yang berbeda. Pada penelitian ini partisipasi sebagai fokus penelitiannya sedangkan yang akan dilakukan partisipasi sebagai dimensi dari pengendalian pembangunan.



No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun oleh Astika dan Subawa pada tahun 2021	Untuk mengevaluasi dan mengetahui tahapan pembangunan yang dilakukan di desa Penatahan, faktor pendorong dan faktor penghambat serta dampak terhadap pelaksanaan pembangunan desa	Desa Penatahan telah melaksanakan tahapan pembangunan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan pembangunan yang telah dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan serta adanya ketergantungan anggaran pembangunan dikarenakan tidak adanya Pendapatan Asli Desa	Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat perbedaan dalam metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama tentang pembangunan yang mana sama-sama terdapat masalah penurunan status desa pada indeks desa membangun
4	Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur oleh Subekan pada tahun 2020	Menggali berbagai faktor keberhasilan pembangunan desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola keuangan desa hingga meraih Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional tahun 2018	Terdapat beberapa faktor pendorong yang berpotensi besar terhadap pembangunan desa yaitu masyarakat yang produktif, potensi sumber daya alam yang mendukung perekonomian desa, mempunyai pimpinan dan perangkat desa yang visioner dan amanah, adanya kemampuan dan kapabilitas dari perangkat desa yang memadai serta adanya partisipasi yang tinggi. Adanya faktor pendorong tersebut maka pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, inklusif dan berdaya tahan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Desa Ngroto Kecamatan Pujon yang dilihat dari pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penurunan status pada indeks desa membangun yang diteliti dari sisi pengendalian pembangunan desa

No	Nama dan Judul Penelitian		Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5	Analisis Indeks Membangun Desa Jeruju Besar Oleh Hajratul, dkk tahun 2020	Desa Jeruju Besar	Menganalisis IDM Desa Jeruju Besar dan mengidentifikasi masalah yang terjadi serta potensi dari Desa Jeruju Besar	Penurunan status desa Jeruju Besar dari mandiri menjadi maju dikarenakan kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas yang tersedia dan masih terbatasnya pelayanan dasar dan SDM serta adanya kondisi hutan mangrove yang mulai rusak namun masih terdapat beberapa potensi diantaranya adanya solidaritas dari masyarakat, adanya lokasi wisata, lembaga keuangan sebagai akses permodalan dan adanya BUMDes sebagai lembaga ekonomi	Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menunjukkan adanya penurunan status desa sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan juga fokus penelitiannya yang mana pada penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis IDM sehingga diketahui masalah dari adanya penurunan status desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada adanya masalah penurunan status akan diteliti dari sisi pengendalian pembangunan
6	Kepemimpinan Desa Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Kecamatan Kabupaten Poso	Kepala Desa Dalam dan di Lage	Mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Malei Kecamatan Kabupaten Poso	Peranan kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik belum baik dan faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan dan kemasyarakatan di desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso adalah SDM dan fasilitas sarana dan prasarana	Pada penelitian ini kepemimpinan sebagai fokus utama sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan kepemimpinan sebagai dimensi dalam pengendalian pembangunan serta metode yang digunakan juga berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
7	<i>Control in the Human Capital Management System in the Strategy of innovative Development of A Region</i> oleh Gerasimov, dkk pada tahun 2019	Mengkaji fungsi pengendalian dan pentingnya proses pembentukan dan perkembangan manusia dalam pengembangan inovatif	Masih kurangnya pengendalian dalam sistem manajemen sumber daya manusia untuk pengembangan inovatif di Republik Tatarstan hal ini dikarenakan tidak terdapat target dalam pengembangan sumber daya manusia dan tidak menghubungkan antara pelaku dan akuntabilitas dalam struktur pelaksana	Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini yaitu sama-sama tentang pengendalian namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini berfokus pada pengendalian sistem manajemen sumber daya manusia sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan.
8	<i>Institutional Model Of Sustainable Development For Controlling Clove Pest Management</i> oleh Sujianto, dkk pada tahun 2020	Menganalisis kelembagaan di sentra produksi cengkeh dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan pengendalian hama cengkeh	Terdapat tiga model kelembagaan yaitu kelompok Temu Urip di Sumedang, Maju Bersama dan Tanijaya hanya berfokus pada kegiatan kerjasama yang meliputi pembukaan lahan, proses budidaya tanaman, penyiangan, panen dan simpan pinjam. Dalam hal ini model kelembagaan yang khusus untuk pengendalian hama belum dikembangkan dan adanya asosiasi dari petani ini berperan penting sebagai lembaga yang mengendalikan hama cengkeh dalam tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan tingkat desa	Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama tentang pengendalian namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini berfokus pada pengendalian hama cengkeh yang ditinjau dari model kelembagaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan yang ditinjau dari kepemimpinan, partisipasi, transparansi dan responsivitas <i>stakeholders</i>

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
9	<i>Village Development Planning Discussion in Indonesia : Is it working ?</i> oleh Syarifuddin,dkk pada tahun 2019	Mendeksripsikan pemasalahan tentang musrenbang sebagai model perencanaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang. Hal ini adanya musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sehingga berjalan tidak efektif	Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama tentang pembangunan desa namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini berfokus pada perencanaan pembangunan desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan dan juga dengan metode yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif.
10	<i>Participatory Village Development Planning Model</i> oleh Nurman, dkk pada tahun 2020	Menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Perencanaan pembangunan desa partisipatif masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurang sinkronnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Desa dalam perumusan dan penetapan prioritas pembangunan	Dalam penelitian ini berfokus pada model perencanaan pembangunan desa partisipatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengendalian pembangunan yang ditinjau dari unsur kepemimpinan, partisipasi, transparansi dan responsivitas <i>stakeholders</i> . Dan dengan metode yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui posisi penelitian pada ranah kajian yaitu selama ini pada penelitian terdahulu berfokus pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan sedangkan yang meneliti tentang pengendalian pembangunan masih jarang dilakukan. Sehingga ditemukan keterbaruan penelitian tentang pengendalian pembangunan yang ditinjau dari dimensi kepemimpinan, partisipasi, transparansi, dan responsivitas *stakeholders* sebagai unsur yang menentukan proses pengendalian pembangunan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Administrasi Publik**

#### **a. Pengertian Administrasi Publik**

Administrasi terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi mengandung dua pengertian yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit administrasi di definisikan sebagai kegiatan tata usaha seperti tulis menulis dan catat-mencatat sedangkan dalam arti luas didefinisikan sebagai proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk publik sendiri diartikan sebagai umum, negara dan masyarakat sehingga pengertian dari administrasi publik itu sendiri adalah sebuah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai tujuannya (Revida *et al.*, 2020).

#### **b. Paradigma Administrasi Publik**

Menurut Nicholas Henry (2017) paradigma administrasi publik terdiri dari enam paradigma yaitu :

##### **1. Paradigma 1: Dikotomi Politik-Adminisrasi Publik (1900-1926)**

Paradigma dikotomi politik-Administrasi Publik dipelopori oleh Leonard D.White dan Frank J.Goodnow yang membagi dua fungsi yang berbeda dari pemerintahan yaitu politik dan administrasi. Paradigma ini menekankan pada locus dari administrasi publik yaitu administrasi negara harus berpusat pada birokrasi



pemerintahan. Dalam hal ini administrator publik harus dapat menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Paradigma II: Prinsip-prinsip Administrasi Publik ( 1927-1937)

Paradigma prinsip-prinsip administrasi publik ini dipelopori oleh W.F. Willoughby, Gulick dan Urwick . Locus dari paradigma ini menekankan pada esensi pada prinsip-prinsip administrasi. Paradigma kedua ini berfokus pada prinsip administrasi POSDCORB yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*.

3. Paradigma III: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik ( 1950-1970)

Paradigma ini adalah usaha dalam menetapkan kembali hubungan antara politik dan administrasi. Namun Dwight Waldo memprotes keadaan ini yang menghasilkan dua perkembangan baru yaitu tumbuhnya studi kasus yang digunakan sebagai sarana yang bersifat epistemologis dan memunculkan perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara.

4. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970)

Paradigma ini menekankan bahwa administrasi negara merupakan bagian dari ilmu administrasi yang terdiri dari teori organisasi dan ilmu manajemen. Dalam hal ini ilmu administrasi tidak mempunyai prinsip umum dan diganti dengan prinsip organisasi dan manajemen. Locus dari paradigma ini administrasi negara mencakup pemerintah dan swasta ( *public* dan *private*).

5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970).

Paradigma ini memunculkan administrasi publik sebagai bidang studi yang otonom dan praktek dengan mengacu pada terobosan administrasi publik dengan ilmu politik dan manajemen. Locus dalam paradigma kelima ini ada pada teori organisasi. Paradigma

ini menekankan pada bagaimana dan mengapa keputusan diambil dan berperilaku dalam organisasi. Paradigma ini menjelaskan bahwa fokus dari administrasi negara terdiri dari teori organisasi, praktik dalam analisis kebijakan publik dan teknik administrasi dan manajemen. Sedangkan locus dari administrasi negara mencakup birokrasi pemerintahan dan masalah publik (*Public Affairs*).

6. Paradigma VI: *Governance* ( 1990-Sekarang)

Adanya peran dari sektor profit, non profit dan publik menuntut adanya perubahan terhadap pemerintahan. Pemerintahan bersifat institusional dan berjejaring sehingga harus menuju tata kelola yang baik. Pemerintah beroperasi sebagai satu kesatuan dan bukan sebagai satu set lembaga dan program yang terpisah. Paradigma ini menekankan pada adanya kolaborasi untuk menciptakan manfaat pada ekonomi dan juga pelayanan publik yang lebih baik (Henry, 2017; Thoha, 2008).

c. **Perkembangan Paradigma Ilmu Administrasi Negara Ke Arah *Good Governance***

Paradigma *Reinventing Government* dan *Good Governance*

Pada tahun 1978 administrasi negara dituntut untuk melakukan reformasi dengan membuka sistem kemitraan negeri dan swasta. Dalam melakukan reformasi administrasi negara dengan merubah orientasi dari pelayanan kepada birokrat menjadi berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi melalui *reinventing government* ini adalah dengan mewirauasakan birokrasi. Wirusaha birokrasi atau *reinventing government* dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik sehingga memunculkan prinsip-prinsip *good governance* seperti Partisipasi (*Participation*), Aturan Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Berkeadilan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*),

Akuntabilitas (*Accountability*), Visi Strategis (*Strategic Vision*), dan Saling Keterbukaan (*Interrelated*). Paradigma *good governance* ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik maka harus berorientasi pada masyarakat dan bukan lagi pada birokrat (Suwitri, 2014).

Berdasarkan paradigma di atas maka diketahui bahwa pengendalian pembangunan di dasarkan pada paradigma *good governance* karena untuk menciptakan penyelenggaraan pembangunan yang solid maka dibutuhkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk menghindari salah alokasi dana dan mencegah terjadinya korupsi baik dari segi politik maupun administrasi.

## **2. Administrasi Pembangunan**

### **a. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan terdiri dari kata administrasi dan pembangunan. Administrasi berarti serangkaian proses pelaksanaan keputusan secara keseluruhan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan sedangkan pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dari suatu negara dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*) untuk menuju suatu modernitas. Sehingga administrasi pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat bertumbuh, berkembang dan berubah baik dari segi kehidupan maupun penghidupan negara dalam upaya pencapaian tujuan yang dilakukan secara sadar dan terencana (Siagian, 2014).

Edward W. Weidner (1967) lebih spesifik merumuskan administrasi pembangunan sebagai berikut: “*Development administration is defined as administrative development and the administration of development programmes. For the administration*

*of the development, it is necessary that the administrative machinery itself should be improved and developed to enable a well coordinated and multi functional approach towards solving national problem on development.”. Edward W. Weidner (1967) menjelaskan bahwa Administrasi pembangunan sebagai administrasi pembangunan dimana diperlukan peningkatan dan pengembangan administrasi untuk memungkinkan pendekatan yang terkoordinasi dan multifungsi dalam memecahkan masalah pembangunan nasional dengan baik (Anggara & Sumantri, 2016).*

#### **b. Fungsi Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu *the development of administration* yang mencakup usaha alam penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga, kepegawaian, penataan kerja dan pengurusan sarana administrasi dan fungsi *the administration of development* yang mencakup perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan serta pelaksanaan pembangunan dari berbagai bidang secara efektif.

Administrasi Pembangunan juga terbagi atas dua sub fungsi yaitu:

- 1) Formulasi kebijaksanaan negara tidak hanya dilakukan dalam proses administrasi tetapi juga dalam tingkatan pada proses politik. Kebijaksanaan dan program dirumuskan dalam rencana pembangunan dengan mekanisme tata kerja yang meliputi proses analisis, perumusan dan pengambilan keputusan.
- 2) Dalam pelaksanaan kebijakan dan program diperlukan penyusunan instrument-instrument yang dilakukan oleh administrator secara efektif (Anggara & Sumantri, 2016).

#### **c. Kegiatan Administrasi Pembangunan**

Terdapat dua kegiatan yang harus diperhatikan dalam administrasi pembangunan yaitu :

- 1) Kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi administrasi sebagai unsur dari pembangunan.



- 2) Pengendalian baik dalam pengurusan administrasi fungsional seperti kelembagaan yang meliputi kepegawaian dan pembiayaan pembangunan sebagai sarana dalam mencapai tujuan kebijaksanaan dan program pembangunan (Anggara & Sumantri, 2016).

### 3. Pengendalian Pembangunan

Sebuah sistem agar dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan maka dibutuhkan upaya pengendalian. Pengendalian pembangunan merupakan bagian dari aspek perencanaan yang sulit beroperasi di negara dalam hal realisasi tujuan dan sasaran yang diharapkan. Pengendalian pembangunan melibatkan pengaturan dari aspek pembangunan secara rinci untuk menciptakan lingkungan yang tertib dalam mencapai kebutuhan hidup yang ideal (Obabori *et al.*, 2007). Pengendalian pembangunan sebagai instrument dari perencanaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan dengan tepat dan dijadikan parameter yang saling terkait antara teknik hukum dan administrasi untuk menjaga dan mengatur seluruh kepentingan masyarakat (Odekunle *et al.*, 2019).

Pengendalian pembangunan merupakan suatu mekanisme yang digunakan agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan. Pengendalian pembangunan digunakan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan melalui upaya negosiasi atau tawar-menawar untuk memastikan bahwa parameter dari negosiasi jelas dan prosesnya tidak dikaburkan sehingga setiap proses dalam pengambilan keputusan dan bagaimana prosesnya harus dapat diakses oleh pengguna sistem untuk memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Pengendalian pembangunan dimulai dari perencanaan untuk memastikan kepastian keputusan dan juga berawal dari keinginan untuk memastikan bahwa di masa depan pembangunan sesuai dengan persepsi tatanan yang baik (Booth, 1996) .



Adapun unsur yang menentukan proses pengendalian pembangunan antara lain:

**a) Kepemimpinan Kepala Desa**

Menurut Peter G. Northouse” *Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal*” artinya Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu untuk mempengaruhi sekelompok individu untuk dapat mencapai tujuan bersama. Definisi ini menjelaskan beberapa konsep penting dalam kepemimpinan yaitu kepemimpinan sebagai suatu proses, kepemimpinan melibatkan pengaruh, kepemimpiann terjadi dalam suatu kelompok dan kepemimpinan melibatkan tujuan bersama (Northouse, 2019). Sedangkan Robert N.Lussier dan Cristopher F. Achua mengemukakan bahwa “*Leadership is the influencing process of leaders and followers to achieve organizational objectives through change*”. Robert N. Lussier dan Cristopher F.Achua ini mendefinisikan kepemimpiann sebagai suatu proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin tetapi juga pengikut sehingga terdapat timbal balik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perubahan (Robert N. Lussier & Christopher F. Achua, 2010).

Menurut Springer, *et al* (2020), dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan kepemimpinan lokal dan pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting. Seorang pemimpin harus mempunyai visi pembangunan dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi warga serta dapat melibatkan warganya dalam mewujudkan visi tersebut. Kepemimpinan dapat dikatakan efektif apabila mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai kunci dari pembangunan berkelanjutan. Adanya tata kelola yang transformasional dapat mendorong dalam peningkatan daya tahan dan keberlanjutan

pembangunan. Tata kelola transformasional ini melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan kemampuannya sehingga dapat memobilisasi dan menarik sumber daya yang baru (Springer *et al.*, 2020).

Kinerja dalam kepemimpinan menurut Fiedler juga sangat bergantung pada bagaimana organisasinya dan gaya kepemimpinannya untuk itu seorang pemimpin dapat efektif dan tidak efektif tergantung pada situasinya sehingga untuk dapat meningkatkan efektivitas organisasi maka harus dapat melatih pemimpin secara efektif dan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang pemimpinnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik (Badu & Djafri, 2017).

Menurut Sergiovanni (2016) dalam Hendri (2019) terdapat empat strategi kepemimpinan yang efektif yaitu :

- 1) *Bartering*, yaitu seorang pemimpin dapat memberikan apa yang diinginkan kepada yang dipimpin dengan menekankan pada “*Tranding*” yaitu keinginan dan kebutuhan. Strategi ini dapat menciptakan hubungan barter dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan antara pemimpin dan bawahannya.
- 2) *Building*, yaitu seorang pemimpin dapat menciptakan iklim dan dukungan yang interpersonal untuk dapat meningkatkan pemenuhan staf dan kebutuhan prestasi, tanggung jawab dan kompetensi serta penghargaan diri. Strategi ini menekankan pada penciptaan kondisi atas pemenuhan kebutuhan bawahan.
- 3) *Binding*, yaitu seorang pemimpin harus dapat mengembangkan nilai hubungan dan ikatan dengan staf secara bersama-sama sehingga dapat diketahui strategi atau cara dalam melakukan kerjasama untuk membangun kinerja yang baik.
- 4) *Bonding*, yaitu seorang pemimpin menekankan pada hubungan saling peduli dengan bergantung pada hasil dari pelaksanaan kewajiban dan komitmen yang dilakukan bersama sehingga

antara kepemimpinan dan juga pengembangan dapat berjalan dengan menjadikan orang-orang satu pikiran, satu hati dan praktik. Strategi kepemimpinan ini menjadikan moral sebagai sumber kekuasaan dan sebagai bentuk tanggungjawab (Hendri, 2019).

Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pengendalian baik dalam meningkatkan kualitas kinerja dimasa yang akan datang, mengukur kinerja yang sebenarnya dan mengevaluasi kinerja agar diketahui berapa jauh penyimpangan yang terjadi dan juga dapat melakukan koreksi apabila standar yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pengendalian melibatkan peran pemimpin bukan dari sifat yang ada pada diri pemimpin namun pada transaksi antara pemimpin dan pengikut. Seorang pemimpin memiliki kekuasaan dalam menegakkan standar kinerja yang akan dicapai dan pengaruh sebagai elemen penting dalam kepemimpinan untuk dapat mengendalikan masa (Sugiyanto, 2016).

Kepemimpinan kepala desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi salah satu faktor yang menentukan arah kebijakan dan sangat berperan dalam pembangunan di desa (Andika *et al.*, 2021). Kepemimpinan juga sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya (Yigibalom *et al.*, 2017). Kepemimpinan sangat berperan penting dalam pembangunan desa dan pemimpin sebagai organisator berperan dalam pencapaian tujuan. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik melalui interaksi dengan anggota atau bawahan dan seluruh elemen organisasi (Syahril, 2019).

Peran kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo (2000; 42) dalam (Syafitri & Suriani, 2019) sebagai berikut:

### 1. Motivator

Motivator merupakan seorang yang memberikan dorongan, pengaruh atau stimulus yang diberikan oleh individu untuk memberikan motivasi agar orang yang termotivasi dapat melaksanakan hal yang dimotivasikan secara rasional, kritis dan tanggung jawab.

### 2. Fasilitator

Fasilitator merupakan seorang yang memberikan fasilitas untuk membantu sekelompok orang dalam memahami dan memecahkan masalah sebagai bagian dari proses komunikasi.

### 3. Mobilisator

Mobilisator merupakan seorang yang dapat mengarahkan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan pembangunan guna kepentingan bersama.

### **b) Partisipasi**

Secara etimologis, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan dalam suatu kegiatan. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang yang berupa keterlibatan emosi, mental dan fisik dalam suatu kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dan mendorong tanggung jawab atas keterlibatannya (Dwiningrum, 2011). Menurut Poza-Vilches *et al* (2019), proses partisipasi sebagai strategi yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi digunakan sebagai formula dalam membangun konsensus untuk mencapai keputusan yang terbaik. Pembangunan berkelanjutan ini dipengaruhi dan dipertahankan oleh kebijakan yang membutuhkan transformasi tidak hanya pada politik tetapi juga ekonomi dan sosial serta didukung adanya model partisipasi untuk dapat memenuhi kebutuhan (de Poza-Vilches *et al.*, 2019).

Partisipasi adalah kekuatan dari masyarakat yang digunakan untuk mengatasi persoalan masa kini untuk mencapai kehidupan di masa mendatang yang lebih baik. Menurut Juliantara (2002:87) dalam Ompusunggu (2017) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu pemerintahan dengan tidak ada kebijakan yang diambil tanpa persetujuan rakyat sedangkan dari arah dasar partisipasi dikembangkan melalui proses pemberdayaan. Pengembangan partisipasi ini bertujuan untuk mewujudkan rakyat yang mandiri dalam mengorganisasi diri sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menghadapi setiap situasi sulit yang merugikan. Partisipasi juga tidak hanya sebagai bentuk aspirasi tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kepentingan masyarakat serta adanya partisipasi dalam persoalan dinamika pembangunan dapat diatasi dengan adanya keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan dengan menekankan pada *voice*, akses dan *control*.

Partisipasi menurut Conyer adalah keikutsertaan masyarakat yang dilakukan secara sukarela atas dasar determinan dan kesadaran diri dalam program pembangunan. Masyarakat merupakan elemen yang paling penting dalam proses pembangunan karena percepatan pembangunan dapat dilakukan apabila dilakukan secara *bottom-up* yaitu adanya peran aktif masyarakat dalam memajukan pembangunan (Latif *et al.*, 2019).

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) terdapat empat jenis partisipasi berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi yaitu :

#### 1) *Participation in Decision Making*

Partisipasi dalam pengambilan keputusan mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Bentuk dalam partisipasi ini berupa pemberian kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dalam menilai suatu rencana atau program. Terdapat tiga jenis keputusan yaitu



keputusan awal, keputusan yang sedang berlangsung dan keputusan operasional. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini menekankan pada prioritas pembangunan yang dipilih dan dituangkan ke dalam suatu program yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2) *Participation in Implementation*

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan dalam program pembangunan yang dapat dilihat dari bentuk kontribusi sumber daya yang mencakup tenaga kerja, uang material dan informasi, administrasi dan koordinasi serta kegiatan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan.

3) *Participation in Benefit*

Partisipasi masyarakat dalam menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan dalam mencapai pelaksanaan pembangunan. Dalam hal pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan pemerataan dalam hal kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan serta dapat menikmati hasil pembangunan. Penikmatan dalam program pembangunan ini ditujukan kepada pegawai pengelola sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, daya potensi dan kreatifitas dan tidak hanya itu dalam partisipasi ini juga dapat dilihat dampak dari hasil pembangunan termasuk peningkatan daya potensi dan kreatifitasnya. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan dan partisipasi dalam upaya pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan.

#### 4) *Participation in Evaluastion*

Partisipasi masyarakat dalam menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan secara langsung serta hasil-hasilnya (Cohen, 1977).

Partisipasi *stakeholders* dalam manajemen organisasi atau pembangunan dipertimbangkan atas dua persepektif yaitu partisipasi *stakeholders* mempertimbangkan pada kerangka kebijakan organisasi dan mempertimbangkan pada pencapaian tujuan kinerja organisasi. Partisipasi *stakeholders* digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada keputusan, proses dan kebijakan organisasi. Adanya partisipasi *stakeholders* dapat membantu dalam menghadapi tantangan pembangunan dengan berkontribusi melakukan perubahan yang lebih baik dalam pembangunan dengan mengarah pada realisasi tujuan yang telah disepakati bersama. Partisipasi *stakeholders* dapat meningkatkan kinerja apabila dijalankan dengan benar dan keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh cara *stakeholders* pembangunan menanggapi dinamika kelompok, komunikasi antar *stakeholders*, kejelasan tujuan dan kualitas perencanaan (Usadolo & Caldwell, 2016).

#### c) **Transparansi Publik**

Transparansi dalam Bahasa Inggris yaitu *transparency* atau *transparent* dan berasal dari dua kata yaitu “*trans*” yang berarti perpindahan atau pergerakan dan “*parent*” yang berarti layak (Oliver, 2004). Menurut Ngozi (2018), transparansi sangat penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Seorang pemimpin harus dapat bertanggungjawab secara terbuka dengan apa yang telah dicapai dengan kinerjanya dan berapa banyak dana yang digunakan dalam setiap sektor pada setiap tahunnya. Implikasi dari transparansi yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh organisasi harus cukup teliti

agar mendapatkan pengawasan publik. Transparansi berupa ketersediaan informasi yang lengkap untuk digunakan sebagai upaya kolaborasi, kerjasama dan kolektif dalam setiap pengambilan keputusan yang merupakan bagian dari pembangunan sosial. Transparansi mencakup pada tindakan keterbukaan, komunikasi dan akuntabilitas serta dalam penyampaian informasi harus dapat mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat melihat dan mengetahui tindakan apa yang dilakukan (Ngozi, 2018).

Transparansi menurut Mardiasmo adalah ”keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi”. Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan informasi terkait keuangan dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari pemangku kepentingan. Dengan transparansi akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Transparansi dapat menjamin adanya akses atau kebebasan dalam memperoleh informasi tentang proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai (Iznillah *et al.*, 2018).

Menurut Pedro, *et al* (2021), Transparansi merupakan suatu proses komunikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam urusan publik. Tujuan dari adanya transparansi sendiri adalah untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi dari *stakeholders* sebagai sistem demokrasi dengan tindakan mempublikasikan informasi tentang urusan publik ( Navas *et al.*, 2021). Terdapat beberapa atribut informasi transparansi antara lain :

- 1) Kebenaran, yaitu informasi yang disajikan harus terjamin kebenarannya secara keseluruhan tanpa menghilangkan data

atau informasi dan juga informasinya harus dapat dipahami oleh masyarakat umum.

- 2) Ketepatan waktu, yaitu memuat kapan informasi dapat dipublikasikan dengan mempertimbangkan manfaat publik dengan dilakukan pembaharuan informasi sesuai dengan ketentuan dan juga memberikan informasi di waktu yang tepat dengan mencantumkan tanggal agar masyarakat mengetahui bahwa informasi telah dipublikasikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.
- 3) Aksesibilitas, yaitu tentang kemudahan mendapatkan akses informasi dengan mengelompokkan area informasi yang dapat dikenali sehingga dapat meningkatkan partisipasi.
- 4) Kegunaan, yaitu informasi diberikan dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat ataupun organisasi yang berkepentingan dengan tidak diantisipasi dan informasi yang diberikan harus terbuka.
- 5) Kecerdasan, yaitu berkaitan dengan kejelasan konten dalam publikasi. *Stakeholders* wajib mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan jurnalistik yang jelas dan mudah dipahami.
- 6) Keuniversalan, yaitu informasi dipublikasikan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dalam mengakses informasi baik informasi tertulis maupun audio visual sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai terlepas dari kapasitas yang berbeda (Navas *et al.*, 2021).

Keterbukaan keuangan dalam pemerintahan desa merupakan aspek utama dalam menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa. Adanya keterbukaan informasi keuangan desa maka pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari publik dan terbuka dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan. Bentuk keterbukaan dari proses

pelaksanaan pembangunan salah satunya adalah wajib memasang papan kegiatan yang berisi tentang kegiatan pembangunan dan jumlah dana yang digunakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat ikut mengawasi secara langsung dari proses kegiatan pembangunan agar terhindar dari penyimpangan (Afnan, 2019). Selain keterbukaan keuangan juga harus terdapat keterbukaan dalam laporan pembangunan. Setiap pemerintahan desa wajib melakukan keterbukaan terkait laporan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan akses. Adanya peningkatan atas keterbukaan informasi maka akan diiringi juga dengan peningkatan akuntabilitas. Keterbukaan atas laporan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak publik dengan melaporkan dengan jujur, terbuka dan tidak diskriminatif terkait laporan terutama laporan terkait dengan dana yang telah digunakan (Wardani & Yuniatin, 2022).

**d) Responsivitas *Stakeholders***

Responsivitas merupakan kemampuan dalam mengakses dan memahami kepentingan, kebutuhan dan tuntutan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembentukan strategi untuk memberikan tanggapan yang memadai (Jacobs, 2003). Menurut Marianata (2019), salah satu prinsip yang harus ada dalam proses perencanaan pembangunan desa adalah daya tanggap atau responsivitas. Adanya prinsip responsif maka pemerintah harus tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan rakyat tanpa harus menunggu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya terlebih dahulu. Pemerintah dituntut untuk proaktif dalam mempelajari dan menganalisis setiap kebutuhan masyarakatnya (Marianata, 2019).

Menurut Dwiyanto (1995) dalam Afrizal (2018) responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan



masyarakat, penyusunan agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program berdasarkan aspirasi masyarakat. Responsivitas ini mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan, aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan penilaian responsivitas dari sumber data organisasi dan masyarakat (Afrizal, 2018).

Menurut Claus Jacobs ( 2003) responsivitas terbagi atas tiga dimensi yaitu :

- 1) *Perceptivity*, yaitu kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi isu-isu yang diangkat dari pemangku kepentingan. Dalam perseptif ini para pemangku kepentingan menyuarakan masalah dan kepentingannya yang didasarkan pada rasa ingin tahu, kemauan dan kebutuhan.
- 2) Refleksifitas, yaitu kemampuan organisasi dalam memahami isu-isu dari para aktor. Dalam refleksifitas para pemangku kepentingan berpeluang untuk menampilkan pandangan dan asumsinya.
- 3) Adaptif, yaitu kemampuan organisasi dalam merespon isu-isu. Dalam adaptif para pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan yang didasarkan pada refleksi dan pemahaman yang mengacu pada kemampuan untuk merespon (Jacobs, 2003).

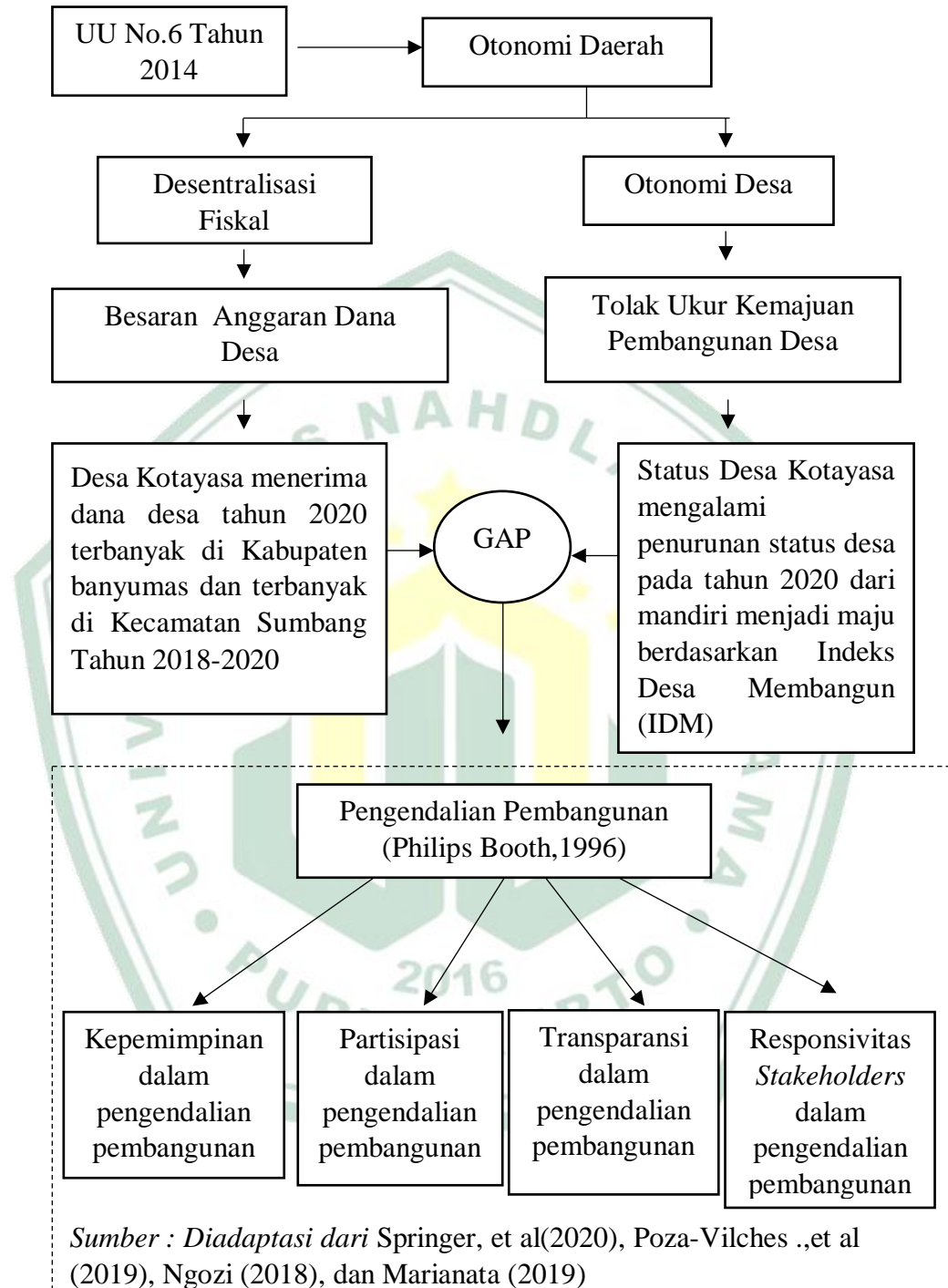
Responsivitas menunjuk pada keselarasan program dan kegiatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa harus dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, mengenali kebutuhan, menanggapi keluhan dan menampung aspirasi dari masyarakat. Responsivitas sebagai salah satu indikator dari kinerja menggambarkan kemampuan birokrat dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan desa (Manoi *et al.*, 2021). Kemampuan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat

merupakan salah satu wujud dari responsivitas pemerintah kepada masyarakat sebagai wujud dari good governance (Putri, 2021).

#### **4. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan nasional karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dalam ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (Mardhiah, 2017). Konsep pembangunan desa ini menempatkan masyarakat dalam posisi yang berarti dan sentral dalam pembangunan. Masyarakat sebagai penentu dalam proses pembangunan untuk melihat apakah pembangunan itu menjadi sarana untuk proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa pemerintah (Purnamasari, 2018). Pembangunan desa merupakan upaya untuk mengubah wajah desa, mengubah hidup dan kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik, adil dan bermakna sehingga adanya pembangunan desa ini dapat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat (Kimbal, 2018).

### C. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

———— Alur Penelitian

----- Fokus Penelitian

**D. Hipotesis**

H : Kapasitas pengendalian pembangunan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang kurang optimal , karena

- a. Kepemimpinan dalam pengendalian pembangunan yang kurang optimal.
- b. Partisipasi dalam pengendalian pembangunan yang berperan aktif.
- c. Transparansi dalam pengendalian pembangunan yang cukup terbuka.
- d. Responsivitas *stakeholders* dalam pengendalian pembangunan yang kurang responsif.

